

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Batas Wilayah

Desa Pemurus terletak di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sawah dan sungai merupakan sebagian dari area wilayah desa tersebut.

Adapun area perbatasan Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh adalah sebagai berikut:

- a. Disisi Utara berbatasan langsung dengan Desa Simpang Warga Dalam
- b. Disisi Selatan berbatasan langsung dengan Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru
- c. Disisi Timur berbatasan langsung dengan desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
- d. Disisi Barat Berbatasan langsung dengan Desa Tanipah

2. Jarak Desa

Jarak Desa Pemurus dengan Kecamatan Aluh-Aluh adalah 8 KM, dan jarak Desa Pemurus dengan Kabupaten banjar adalah 62,9 KM,

sedangkan jarak Desa Pemurus dengan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 117 KM.

3. Luas Wilayah

Desa Pemurus memiliki luas wilayah sebesar 6,45 km². Dimana daerahnya yang merupakan terdiri daerah dataran rendah, sungai, area persawahan dan permukiman penduduk.

4. Iklim

Desa Pemurus memiliki iklim dengan rata-rata suhu perharinya berkisar antara 24°C sampai 38°C. Dimana Desa Pemurus ini memiliki tingkat curah hujan yang tinggi dan tingkat kelembapan udaranya pun cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Namun, Desa Pemurus ini juga mempunyai dua musim iklim yang tetap yaitu musim hujan dan musim kemarau.

5. Sarana dan Prasarana Desa

Pemerintah Desa Pemurus terbagi menjadi 8 RT dengan sarana dan prasarana pemerintahan terdiri dari 1 buah kantor kepala desa. Dan sarana prasarana pendukungnya berupa 1 buah mesjid, 1 buah puskesmas pembantu, 4 buah sekolah PAUD/ TK, 3 buah sekolah SD/ MI sederajat, 2 buah SMP/ Mts sederajat, 1 buah TPA/TPQ, dan 5 buah mushola.

6. Visi dan Misi Desa

Visi desa adalah mewujudkan Desa Pemurus yang maju, unggul, sejahtera dan religius dengan berbasiskan kebersamaan dan gotong royong.

Sedangkan misi Desa Pemurus adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM berbasis peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan masyarakat dengan pelayanan yang prima.
- c. Meningkatkan upaya pembangunan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, usaha kecil dan perorangan secara kelompok.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Memberikan pendampingan dan fasilitasi organisasi keagamaan dan tempat-tempat ibadah dalam rangka peningkatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
- f. Meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap kemajuan pemabngunan desa melalui kebersamaan dan gotong royong.

Peneliti mengumpulkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, sebagaimana informasi dan nama informan diperoleh sebagai berikut:

Informan 1

Nama : Nurul Fajri
Usia : 40
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Status : Kepala Desa
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 06

Informan 1 Kepala Desa Pemurus, menerangkan bahwa prioritas utama dalam pembangunan di Desa Pemurus adalah di prioritaskan pada jalan poros, yaitu jalan utama berupa jalan dan jembatan agar menunjang kelancaran alternatif bagi masyarakat desa pemurus. Begitupun, dalam pembangunan infrastrukturnya masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembangunannya. Dan sistem pelaksanaannya pun selalu melibatkan para masyarakat melalui sistem gotong royong, atau swakelola, maupun pihak ketiga.

Namun, ada sedikit kendala dalam pembangunan infrastruktur tersebut yaitu pada akses pengangkutan bahan baku dimana jalan desa pemurus hanya bisa dilalui dengan roda dua atau melalui sungai saja, “cara kami mengatasi kendala tersebut adalah dengan melalui akses kapal saja” ujar Kepala desa Pemurus.

Penggunaan dana desa sudah dilakukan secara transparansi yaitu dengan dibuktikan bahwa APBDES yang dikelola dan dibuat harus dipaparkan sebagai acuan dan pedoman untuk ditindaklanjuti dalam tahun berjalan. Begitupun proses penyusunan pelaporan dana desa yang dilakukan secara berkala atau bertahap yang harus disertakan dengan SPJnya, “jadi SPJ yang kita lasanakan setiap kali dana desa keluar dengan tahap pertama kita harus menyelesaikan SPJnya dulu baru kita menyelesaikan tahap kedua” ujar Kepala Desa Pemurus.

Masyarakat juga diberikan forum untuk menyampaikan aspirasi atau usulan terkait dengan pembangunan desa dengan melalui forum BPD yang kemudian disampaikan kepada aparat desa yang bersangkutan. Dalam penyerapan atau penyaluran anggaran bisa terlambat apabila ada berkas-berkas yang belum lengkap untuk pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat.

Informan 2

Nama : Ahmad Saukani
Usia : 36
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Status : Sekretaris Desa
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 05

Informan 2 Sekretaris Desa Pemurus, memperlihatkan anggaran dana desa yang diterima oleh desa pemurus pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 900.828.000. Dimana pengalokasian dana tersebut yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan desa adalah sebesar Rp. 531.578.290., yang berupa untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

Dengan adanya pembangunan tersebut sekretaris desa berharap agar sekiranya dapat membuat masyarakat terbantu untuk mempermudah akses jalan maupun untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dimana pada awalnya jalan maupun jembatan yang hampir rusak tersebut susah untuk dilalui dan sekarang jadi lebih baik.

Informan 3

Nama : Amarudin
Usia : 38 Tahun
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Status : Kaur Keuangan
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 03

Informan 3 Kaur Keuangan, “prioritas pembangunan pada beberapa tahun terakhir yaitu pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa dan jembatan” ujar kaur keuangan, pembangunan tersebut telah menjadi penggunaan utama

pendapatan desa dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi di desa sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Pejabat desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpartisipasi dalam diskusi desa untuk menentukan pembangunan infrastruktur.

Kaur Keuangan menjelaskan bahwa karena keterbatasan keuangan, tidak setiap ide masyarakat dapat langsung terlaksana. Informan ini juga menyoroti peran penting yang dimainkan oleh BPD, staf keuangan desa, dan kepala desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur. Sebagai hasil transparansi dana desa maka diberikan papan informasi kegiatan transparansi keuangan untuk dipahami oleh masyarakat, namun beberapa warga masih belum sepenuhnya memahami detail anggaran.

Informan 4

Nama : Muhammad Juhri
Usia : 40 Tahun
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Status : Staf Kaur Keuangan
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 07

Informan 5 Staf Kaur Keuangan, dalam rangka mengelola dana desa, staf kaur keuangan ini menekankan pentingnya penganggaran yang disiplin dan teratur. Sebagaimana yang telah mereka lakukan dalam penganggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada desa. Setiap proyek pembangunan di desa harus sesuai dengan rencana dan tetap berada dalam Anggaran Desa (APBDes).

“Setiap kegiatan pembangunan infrastruktur akan selalu dicatat baik secara visual maupun tertulis oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab” ujar Muhammad Juhri selaku staf kaur keuangan. Secara berkala, laporan

pertanggungjawaban dibuat dan disampaikan kepada pihak berwenang yang terkait. Aparat desa dapat menerima pengaduan atau komentar langsung dari masyarakat, karena keterbukaan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik hingga membuat pembangunan infrastruktur berjalan secara keseluruhan dengan cukup baik.

Informan 5

Nama : Akmal Fauzan, S.kom
Usia : 26 Tahun
Pendidikan : S1
Status : Kaur Umum dan Perencanaan
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 05

Informan 5 Kaur Umum dan Perencanaan, melalui forum perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), masyarakat dapat dilibatkan sejak awal proses perencanaan, karena dalam forum tersebut masyarakat dapat menyampaikan usulan atau keluhan terkait pembangunan desa. Kaur umum dan Perencanaan ini juga menerangkan bahwa meskipun kehadiran masih tidak menentu, minat masyarakat sangat tinggi dalam musrenbangdes ini.

Kegiatan pembangunan infrastruktur sebagian besarnya dilaksanakan dengan pendekatan padat karya atau gotong royong. Namun, keterlambatan pengiriman material bangunan merupakan tantangan umum dalam pembangunan infrastruktur di desa Pemurus ini. Selain karena pengiriman barang yang menggunakan kapal tersebut membuat barang lambat sampainya ketujuan, cuaca juga mempengaruhi kecepatan kapal material yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Informan 6

Nama : Rizky Rizkyannor, S.Ap

Usia : 27 Tahun

Pendidikan : S1

Status : Kasi Pemerintahan

Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 06

Informan 7 Kasi Pemerintahan, prioritas pembangunan infrastruktur pada desa terdapat pada pemeliharaan jalan desa, dan pemeliharaan jembatan. Dan dalam pemeliharaan jalan ataupun jembatan masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembangunannya seperti dilibatkan menjadi tukangnyanya ataupun dilibatkan dalam lingkup gotong royong. Sedangkan sistem pelaksanaannya dilakukan secara swakelola atau di bawah tanggungjawab pihak yang berwenang.

Pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparansi dengan membuktikan dari papan informasi atau menunjukkan bukti transfer pembayaran bahan baku untuk pembangunan. Begitupun dengan proses penyusunan laporan keuangannya yang dilakukan setiap tahunnya dan juga diadakan sistem evaluasi oleh pihak kecamatan dan yang bersangkutan agar sekiranya dana desa tersebut dikeluarkan sesuai sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Pemurus.

Informan 7

Nama : Nur Kumalasari, S.M

Usia : 25 Tahun

Pendidikan : S1

Status : Kasi Kesejahteraan dan pelayanan

Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 01

Informan 7 Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, menurut Nur Kumalasari

sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, pembangunan infrastruktur yang didanai desa sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus utama dalam pembangunan infrastruktur desa adalah pada jalan desa dan fasilitas umum. Namun, ia juga berpendapat bahwa masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pengawasan pembangunan, agar kiranya tidak ada kesalahpahaman dalam pembangunan sebagaimana yang mereka usulkan sesuai kebutuhan mereka.

Penyebaran informasi kegiatan juga sudah menjadi upaya untuk meningkatkan transparansi dilingkungan masyarakat. Namun, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang anggaran desa merupakan suatu tantangan bagi kami, ujar kasi kesejahteraan dan pelayanan. Akibatnya, staf pelayanan atau staf lainnya sering memberikan penjelasan yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat.

Informan 8

Nama : Drs. Hj. Ahmad Yamani

Usia : 51 Tahun

Pendidikan : S1

Status : Kepala Lingkungan 1

Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 03

Informan 8 Kepala Lingkungan 1, desa telah memberikan warga setempat forum untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Tempat utama untuk menyuarakan pendapat mereka adalah forum yang sudah disediakan oleh desa. Selain itu, masyarakat juga dapat secara informal menyuarakan kekhawatiran mereka melalui berbicara langsung kepada RT setempat ataupun melalui BPD yang ada. Menurut kepala lingkungan 1, penggunaan dana desa untuk

pembangunan infrastruktur telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar, dan akses jalan telah meningkat. Namun, kepala lingkungan 1 juga mengakui bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Karena, keterbatasan anggaran masih perlu dipertimbangkan ketika menetapkan sebuah pembangunan infrastruktur.

Informan 9

Nama : Ahmad Mursyada, S.pd
Usia : 53 Tahun
Pendidikan : S1
Status : Kepala Lingkungan 2
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 06

Informan 9 kepala lingkungan 2, menurut kepala lingkungan 2, keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur umumnya sudah dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah. Administrasi desa masih berupaya menuju akuntabilitas dan keterbukaan. Menurut informan, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Koordinasi dapat membantu mengatasi tantangan administratif dan teknis yang masih ada. Informan percaya bahwa pelatihan akan terus meningkatkan kemampuan para pemimpin desa. Selain itu, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dana lokal. Di masa depan, hal ini akan memungkinkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

Informan 10

Nama : Iberahim
Usia : 45 Tahun
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Status : Masyarakat
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 05

Menurut informan 10 Bapak Ibrahım menyampaikan bahwa, pemerintah desa telah memasang papan informasi anggaran di dekat kantor desa untuk memberi tahu masyarakat tentang bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, forum musyawarah desa, yang biasanya diadakan juga memberikan informasi terkait tentang penggunaan dana desa. Bapak Ibrahım juga mengatakan bahwa meskipun informasi ini mudah diakses, namun beberapa warga setempat masih belum sepenuhnya memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan. Bapak Ibrahım mengakui telah berpartisipasi dalam Musyawarah desa. Bapak Ibrahım juga memberikan harapannya agar pembangunan desa bisa lebih baik lagi kedepannya seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Informan 11

Nama : Raudah
Usia : 55 Tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Status : Masyarakat
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 06

Menurut informan 11 Ibu Raudah, pemerintah desa telah menyebarluaskan informasi tentang bagaimana keuangan desa digunakan, sebagian besar melalui pengumuman tertulis dan diskusi masyarakat. “Meskipun pada diskusi tersebut tidak setiap warga dapat hadir terutama saya” Ujar Ibu Raudah. Menurut Ibu Raudah, masyarakat diberi kesempatan untuk menyarankan kebutuhan pembangunan melalui forum musyawarah ketika menyangkut partisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Ibu Raudah berharap agar kedepannya sebagian besar inisiatif pembangunan yang didukung oleh keuangan desa lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum dan jalan.

Informan 12

Nama : Zainab
Usia : 50 Tahun
Pendidikan : SLTP/ Sederajat
Status : Masyarakat
Alamat : Jl. Desa Pemurus RT 05

Informan 12 Ibu Zainab menyampaikan, pertemuan desa dan papan informasi biasanya digunakan untuk memberikan informasi tentang bagaimana keuangan desa digunakan, tetapi tidak semua warga sepenuhnya menyadari informasi ini. Karena, informasi ini sering dikomunikasikan menggunakan bahasa yang terlalu teknis untuk dipahami oleh masyarakat umum. Masyarakat merasa sangat terbantu dari adanya pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa, terutama dalam hal mendukung kegiatan sehari-hari. Namun, Ibu Zainab juga menginginkan agar masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Informan 13

Nama : Imam Iskandar Faisal, S.Pd
Usia : 29 Tahun
Pendidikan : S1
Status : Masyarakat
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 06

Menurut informan 13, penyampaian informasi tentang dana desa sudah disampaikan atau diterangkan melalui papan informasi. Bapak Imam Iskandar Faisal mengakui bahwa beberapa warga setempat tidak aktif terlibat dalam pertemuan tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana keuangan desa digunakan. Menurut informan, masyarakat diberi kesempatan untuk

menyampaikan pemikiran dan rekomendasi mereka selama perencanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat diperkirakan akan banyak mendapat manfaat dari peningkatan infrastruktur yang telah dilakukan, terutama dalam hal meningkatkan kemudahan akses jalan desa dan kenyamanan di lingkungan desa. Dan harapan Bapak Imam Iskandar Faisal untuk kedepannya agar pemerintah desa dapat memprioritaskan pembangunan yang benar-benar penting bagi warga setempat dan lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Informan 14

Nama : Darmawan
Usia : 45 Tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Status : Masyarakat
Alamat : Jl. Desa Pemurus Rt 05

Menurut informan terakhir, Musyawarah bersama masyarakat desa dan papan informasi yang ditempatkan di area publik adalah sumber informasi yang biasanya didapatkan. “Pembangunan yang didanai desa sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terkait fasilitas umum dan jalan” ujar Bapak Darmawan. Bapak Darmawan tersebut juga berharap ke depannya, pemerintah desa akan melaporkan penggunaan anggaran secara lebih terbuka. Untuk menjamin pengelolaan dana pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. Analisis Data

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) dan didistribusikan ke desa-desa untuk menyeimbangkan kapasitas

keuangan desa dan memenuhi kebutuhan desa akan pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola desa. Dana desa merupakan sebagian kecil dari dana desa yang dicairkan melalui kas daerah setelah diperoleh dari Kabupaten.

Proses pengelolaan anggaran dana desa untuk kebutuhan pembangunan fisik dan non-fisik, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dikenal sebagai manajemen keuangan dana desa di Desa Pemurus. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada desa pemurus terdapat tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Dimulai dengan membentuk tim pelaksana dan proses perencanaannya yang dilakukan oleh aparat desa dan diikutsertakan oleh badan musyawarah desa (BPD) dan lapisan masyarakat yang tergabung dalam musyawarah desa, tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Pemurus juga mengikuti peraturan pemerintah desa yang berlaku. Hasilnya, aspirasi masyarakat dapat terlihat dan dapat didengar oleh aparat desa, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pemurus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Perencanaan dengan model musyawarah atau rapat ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, namun ternyata dalam musyawarah ini masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengikutinya dan hanya ada beberapa saja yang dapat mewakilkannya. Padahal, musyawarah tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar bisa ikut serta untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Akan tetapi, karena hasil musyawarah yang tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat tersebut maka perencanaan pembangunan infrastruktur ini dapat dikatakan kurang baik, namun kegiatan pembangunan tetap berjalan dengan baik dan sudah dapat membantu kelancaran kehidupan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Setelah disetujuinya Anggaran Dasar Desa (APBDes) dan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tahapannya, tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Pemurus pun dimulai. Kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa juga melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pemanfaatan tenaga kerja lokal diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pada pengerjaan jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja jangka pendek. Pemerintah desa berupaya melaksanakan pembangunan sesuai dengan persyaratan teknis dan rencana anggaran. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, termasuk cuaca buruk dan kekurangan sumber daya, pembangunan sebenarnya berjalan dengan sangat baik. `

Tabel berikut menggambarkan pengelolaan keuangan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur:

Tabel 4.1 Data Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Insentif guru PAUD	Rp.54.000.000
	Belanja rehab PAUD Seroja	Rp.10.000.000
	Belanja kegiatan PMT	Rp.14.400.000
	Belanja insentif kader	Rp.55.200.000
	Belanja alat kesehatan	Rp.5.000.000
	Belanja kegiatan posyandu remaja	Rp.9.600.000
	Kegiatan stunting	Rp.10.000.000
	Belanja rehab postu	Rp.10.000.000
	Insentif KPM	Rp.3.600.000
	Belanja peninggian badan jalan RT 01-03	Rp.160.737.560
	Belanja kegiatan PKTD tahun 2025	Rp.16.000.000
	Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.50.000.000
	Belanja pemeliharaan titian	Rp.20.000.000
	Pembuatan pelabuhan	Rp.60.000.000
	Pengadaan sarana pendukung informasi	Rp.30.000.000
Jumlah		Rp.508.537.560

Sumber: Data Dana Desa Pemurus Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan desa terbagi dalam pembangunan infrastruktur. Adapun infrastruktur sendiri terbagi menjadi dua yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktuktur lunak atau non fisik. Dari data diatas terdapat gabungan pendanaan terhadap dana pelaksanaan pembangunan. Adapun tabel dana pembangunan infrastruktur fisik sebagai berikut:

Tabel 4.2 Dana Pembangunan Infrastruktur Fisik

Jenis Kegiatan	Anggaran
Belanja rehab PAUD Seroja	Rp.10.000.000
Belanja alat kesehatan	Rp.5.000.000

Belanja rehab postu	Rp.10.000.000
Belanja peninggian badan jalan RT 01-03	Rp.160.737.560
Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.50.000.000
Belanja pemeliharaan titian	Rp.20.000.000
Pembuatan pelabuhan	Rp.60.000.000
Pengadaan sarana pendukung informasi	Rp. 30.000.000
Jumlah	Rp.345.737.560

Sumber: Data Dana Desa Pemurus Tahun 2025

Tabel 4.3 Dana Pembangunan Infrastruktur Non Fisik

Jenis Kegiatan	Anggaran
Insentif guru PAUD	Rp.54.000.000
Belanja kegiatan PMT	Rp.14.400.000
Belanja insentif kader	Rp.55.200.000
Belanja kegiatan posyandu remaja	Rp.9.600.000
Kegiatan stunting	Rp.10.000.000
Insentif KPM	Rp.3.600.000
Belanja kegiatan PKTD tahun 2025	Rp.16.000.000
Jumlah	Rp.162.800.000

Sumber: Data Dana Desa Pemurus Tahun 2025

Maka dari itu dana infrastruktur terbagi kedalam infrastruktur fisik dan non fisik. Dimana infrastruktur fisik mendapatkan anggaran dana sebesar Rp.315.737.560 dan sisa nya terdapat pada pembangunan infrastruktur non fisik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada desa pemurus bisa dilakukan secara swakelola, pihak ketiga, atau padat karya. Namun, lebih sering menggunakan padat karya selain untuk memperkuat rasa kebersamaan sistem pelaksanaan ini juga menjadi ladang pekerjaan bagi mereka yang mempunyai bakat dalam hal pembangunan. Akan tetapi kendala dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah cuaca dan

pengiriman material yang lambat karena menggunakan kapal sehingga infrastruktur lambat terealisasi di desa. Walaupun demikian, proyek pembangunan infrastruktur di desa pemurus tetap berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit hambatan dan keterlambatan dalam pengiriman barang.

3. Pengawasan

Tahap pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Pemurus ditangani oleh sejumlah pihak yang bertanggungjawab baik internal dan eksternal. Kepala desa dan jajarannya melakukan pengawasan internal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga terlibat dalam memantau penggunaan Dana Desa. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara aktif mengawasi kemajuan pembangunan infrastruktur di desa mereka sendiri. Pemantauan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap rencana yang telah ditetapkan merupakan cara pengawasan yang dilakukan. Meskipun telah dilakukan pemantauan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Salah satu elemen yang memengaruhi efektivitas pengawasan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan teknis. Secara keseluruhan, tahap pengawasan sedang berlangsung, tetapi masih perlu diperkuat untuk menjamin pembangunan infrastruktur yang terbaik dan berkelanjutan.

Salah satu tanda utama tata kelola desa yang efisien dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan keuangan desa yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik pemerintah desa telah menerapkan konsep pengelolaan keuangan desa sesuai dengan hukum dan peraturan yang

berlaku. Penelitian ini juga mengkaji partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dalam mengevaluasi akses masyarakat terhadap informasi dan akuntabilitas terkait penggunaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Untuk mengetahui seberapa baik strategi, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa saling berkaitan, maka tata tertib dan disiplin anggaran diperiksa. Maka dari itu pengelolaan dana desa hendaknya memuat prinsip-prinsip menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparan

Menurut temuan penelitian, pengelolaan dana desa di Desa Pemurus telah berfokus pada penerapan prinsip transparansi. Untuk menginformasikan masyarakat tentang penggunaan keuangan desa, aparat desa memasang papan informasi tentang anggaran dan kegiatan di sekitar kantor desa. Jenis kegiatan, sumber pendanaan, dan jumlah anggaran yang digunakan semuanya tercantum dalam papan informasi tersebut. Transparansi juga dilakukan dengan diadakannya forum musyawarah desa yang memberikan tempat bagi masyarakat untuk mempelajari rencana pembangunan dan pelaksanaannya. Namun, karena keterbatasan pengetahuan dan akses informasi, sebagian warga masih belum sepenuhnya memahami secara spesifik bagaimana dana desa digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi telah diterapkan, kualitas penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan.

2. Akuntabel

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pemurus telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar akuntabilitas berdasarkan temuan penelitian. Mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengirimkannya kepada pihak yang berwenang, termasuk inspektorat dan kecamatan. Dari perencanaan hingga pelaporan, setiap tindakan yang didanai oleh kas desa disertai dengan dokumen administrasi yang lengkap. Pejabat setempat juga menyadari kewajiban mereka untuk mengelola dana daerah dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya, ketelitian dan kerapian administrasi masih terpengaruh oleh keterbatasan sumber daya manusia. Secara umum, pengelolaan keuangan desa di Desa Pemurus telah cukup akuntabel.

3. Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan keuangan Desa Pemurus. Pertemuan perencanaan pembangunan desa dan diskusi desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan (Musrenbangdes). Masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan ide dan kebutuhan pengembangan infrastruktur desa dalam forum-forum tersebut. Pelaksanaan program juga menunjukkan keterlibatan masyarakat, baik melalui pemantauan informal terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan maupun kerja sama timbal balik seperti pengerjaan proyek infrastruktur yang dilakukan secara gotong royong. Namun, karena tidak setiap kelompok masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan, tingkat partisipasi

masyarakat masih belum merata. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterlibatan masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut hasil penelitian ini, pengelolaan dana desa di Desa Pemurus telah menerapkan konsep tata tertib anggaran. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes), yang dibuat oleh pemerintah desa, berfungsi sebagai peta jalan untuk melaksanakan inisiatif pembangunan. Setiap penggunaan dana desa didasarkan pada rencana yang telah disetujui dan ditetapkan. Distribusi dana dilakukan sesuai dengan langkah dan protokol yang telah ditentukan. Catatan keuangan juga terorganisir dan sistematis. Namun demikian, keterlambatan administrasi terkadang memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Tata tertib anggaran telah diterapkan dengan cukup sukses secara keseluruhan.

Begitu pun dengan disiplin anggarannya Desa Pemurus telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menerapkan disiplin anggaran pada pengelolaan dana desa. Pemerintah desa berupaya untuk membelanjakan anggaran sesuai dengan alokasi yang dimaksudkan dan uang tidak digunakan untuk tujuan selain yang telah dialokasikan. Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur diselesaikan sesuai dengan anggaran dan jadwal. Pemerintah desa menggunakan prosedur yang sesuai dengan peraturan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dedikasi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab ditunjukkan oleh disiplin anggarannya. Meskipun demikian, pengamatan berkelanjutan masih diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan

disiplin anggaran.

Adapun anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh desa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Anggaran Dana Desa Pemurus Tahun 2025

Bidang Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Bidang Pemerintah Desa	Operasional kegiatan PKK	Rp.4.800.000	Rp.3.550.000	73,96%	Rp.1.250.000
	Belanja operasional pemerintah desa yang bersumber dari DD	Rp.27.024.840	Rp.14.100.000	52,17%	Rp.12.924.840
	Belanja perlengkapan penunjang kegiatan pembangunan desa	Rp.11.200.000	Rp.11.200.000	100%	0
Bidang Pelaksanaan	Insentif guru PAUD	Rp.54.000.000	Rp.54.000.000	100%	0

Bidang Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Pembangunan Desa					
	Belanja rehab PAUD Seroja	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	100%	0
	Belanja kegiatan PMT	Rp.14.400.000	Rp.14.400.000	100%	0
	Belanja insentif kader	Rp.55.200.000	Rp.45.600.000	82,61%	Rp. 9.600.000
	Belanja alat kesehatan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	100%	0
	Belanja kegiatan posyandu remaja	Rp.9.600.000	Rp.9.600.000	100%	0
	Kegiatan Stunting	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	100%	0
	Belanja rehab postu	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	100%	0
	Insentif KPM	Rp.3.600.000	Rp.3.600.000	100%	0
	Belanja	Rp.160.737.560	Rp.12.040.730	7,49%	Rp.148.696.830

Bidang Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	peninggian badan jalan RT 01-03				
	Belanja kegiatan PKTD tahun 2025	Rp.16.000.000	Rp.16.000.000	100%	0
	Belanja pemeliharaan jembatan	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	100%	0
	Belanja Pemeliharaan titian	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000	100%	0
	Pembuatan pelabuhan	Rp.60.000.000	Rp.60.000.000	100%	0
	Pengadaan sarana pendukung informasi	Rp.30.000.000	Rp.30.000.000	100%	0
Bidang Pemberdayaan	Penguatan ketahanan	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	100%	0

Bidang Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Masyarakat	pangan desa				
	Peningkatan server GIDES	Rp.3.500.000	Rp.3.500.000	100%	0
	BIMTEK kader dan masyarakat desa	Rp.54.000.000	Rp.54.000.000	100%	0
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	BLT DD bagi warga miskin	Rp.111.600.000	Rp.111.600.000	100%	0
Jumlah		Rp.730.662.400	Rp.558.190.730		Rp.172.471.670

Sumber: Data Desa Pemurus Tahun 2025